

TESIS

**PENGARUH PERENCANAAN, KUALITAS SUMBER
DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KINERJA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

*THE EFFECT OF PLANNING, QUALITY OF HUMAN RESOURCES
AND REGIONAL FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS ON
REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE
OF BUTON SELATAN REGENCY*

**HASMIN JOKO
A042222005**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
HASANUDDIN MAKASSAR**

2022/2023

TESIS

**PENGARUH PERENCANAAN, KUALITAS SUMBER
DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KINERJA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

*THE EFFECT OF PLANNING, QUALITY OF HUMAN RESOURCES
AND REGIONAL FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS ON
REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE
OF BUTON SELATAN REGENCY*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh :

HASMIN JOKO
A042222005



**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
HASANUDDIN MAKASSAR**

2022/2023

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

PENGARUH PERENCANAAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

HASMIN JOKO
A04222005

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
tanggal 22 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 196402051988101001


Dr. Aini Indriyawati, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 196811251994122002

Ketua Program Studi Magister
Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Hasanuddin


Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si
NIP. 197209212006042001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Hasmin Joko

NIM : A042222005

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Judul Penelitian : ***Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan.***

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Makasar, 01 Agustus 2024



Yang membuat pernyataan

HASMIN JOKO

PRAKATA

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini. Dan tak lupa pula Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa kabar gembira dan sebaik-baiknya tauladan bagi yang mengharap Rahmat dan Hidayah-Nya.

Selama proses penulisan Tesis ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Jamauddin Jompa,M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof.Dr. Abdul Rahman Kadir,S.E.,M.Si.,CIPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
3. Ibu Dr. Aini Indirijawati,S.E.,M.Si.,CA selaku dosen pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, juga tambahan referensi serta ilmunya dan dengan penuh sabar dan penuh perhatian dalam penulisan Tesis ini.
4. Ibu Dr. Andi Ratna Sari Dewi,S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dengan sabar dan penuh perhatian dalam menyelesaikan studi ini.
5. Kedua Orang Tua, Bapak Liwon dan ibunda tercinta Hasnah, terima kasih atas doa dan dukungannya, baik moril maupun materiil. Beliau adalah malaikat yang dikirim oleh ALLAH SWT serta anugrah terindah bagiku. Terima kasih atas kasih sayang yang selama ini telah dicurahkan untukku.
6. Kepada bapak dan ibu penguji dan segenap dosen pengajar yang telah memberi ilmu dan meluangkan waktunya hingga studi ini dapat kami lewati dengan sangat baik, tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya .

7. Orang-orang tersayangku, keluarga kecilku yang telah menemani dan memberikan semangat kepadaku dan memotifasi untuk tetap bertahan dan tetap bersemangat untuk menggapai cita-cita.
8. Teman-teman seperjuangan MKD Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
9. Keluarga besar La Angge dan keluarga besar Maanufuri, yang selalu memberikan dukungan, terima kasih yang sebesar-besarnya hingga berada pada tahap ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis buat baik sengaja maupun tidak disengaja selama berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin maupun selama penulisan Tesis ini. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan menunjukkan jalan yang lurus dan benar kepada kita semua. Aamiin

Makassar, 2024

Penulis

ABSTRAK

HASMIN JOKO. *Pengaruh Perencanaan, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan* (dibimbing oleh Abdul Rahman Kadir dan Aini Indrajawati).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh parsial perencanaan, kualitas sumber daya manusia, dan sistem informasi pemerintahan daerah terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dan variabel lainnya. Penelitian ini dimaksudkan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang semakin baik, akan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang perencanaan anggaran terhadap kinerja keuangan daerah menunjukkan rata-rata tanggapan responden yang tinggi/baik. Meskipun demikian, masih ada yang menunjukkan respon ragu dan tidak setuju pada kinerja keuangan daerah yang saat ini dirasakan terhadap penyerapan anggaran. Hasil wawancara dengan beberapa ASN di Kabupaten Buton Selatan yang ditemui mengatakan bahwa perencanaan anggaran yang terkait dengan kinerja keuangan daerah sudah cukup baik namun masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tingkat kinerja keuangan daerah akan lebih baik lagi.

Kata kunci: perencanaan anggaran, sumber daya manusia, sistem informasi pemerintahan daerah, kerja keuangan daerah



ABSTRACT

HASMIN JOKO. *The Effect of Planning, Quality of Human Resources, and Regional Government Information System on Regional Financial Performance of South Buton Regency* (supervised by Abdul Rahman Kadir and Aini Indrajawati)

This research aims to analyze the partial effect of planning, quality of human resources, and regional government information systems on the regional financial performance of South Buton Regency. This research used a quantitative approach aiming to explain the position of the variables studied and the relationship between one variable and another variable. This research was intended to test hypotheses that had been previously formulated. This research was expected to explain the causal relationship between variables through hypothesis testing using the SPSS program. The results of the research show that the better budget planning can improve regional financial performance. The results also show that respondents' responses regarding budget planning towards regional financial performance show that the average response of respondents is high/good although there are still those who show doubts and disagreements regarding the regional financial performance that is currently felt regarding budget absorption. The results of interviews with several ASNS in South Buton Regency indicate that budget planning related to regional financial performance shows that budget planning is quite good, but it still needs to be adjusted to the needs of the community that is more important so that the level of regional financial performance can be even better.

Key words: budget planning, human resources, regional government information systems, regional financial work.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.5. Batasan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	9
2.1.1 Kinerja Keuangan Daerah	9
2.1.2 Perencanaan Anggaran	11
2.1.3 Konsep APBD.....	16
2.1.4 Proses Penyusunan APBD.....	20
2.1.5 Implementasi APBD	26
2.1.6 Kualitas Sumber Daya Manusia	29
2.1.7 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	34
2.2 Penelitian Terdahulu	36
BAB III KERANGKA DAN HIPOTESIS.....	39
3.1. Kerangka Pemikiran	39

3.2	Hipotesis	40
3.2.1	Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	40
3.2.2	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	41
3.2.3	Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Kinerja Keuangan Daerah	42
 BAB IV METODE PENELITIAN.....		44
4.1.	Rancangan Penelitian.....	44
4.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian	44
4.3.	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	44
4.4.	Jenis Dan Sumber Data	45
4.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	45
4.6.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	46
4.6.1.	Variabel Penelitian	46
4.6.2.	Defenisi Operasional	46
4.7.	Instrumen Penelitian	49
4.8.	Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis	49
4.8.1.	Analisis Deskriptif	49
4.8.2.	Uji Kualitas Data (Validitas dan Realibilitas)	50
4.8.3.	Model Regresi Berganda	51
4.8.4.	Uji Hipotesis	51
 BAB V HASIL PENELITIAN		53
5.1.	Uji Validitas dan Reabilitas	55
5.2.	Profil Responden.....	53
5.3.	Deskripsi Tanggapan Responden	57
5.4.	Hasil Analisis Data	62
5.5.	Pengujian Hipotesis	63
5.6.	Pembahasan	65
5.6.1.	Pengaruh Perencanaan anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	65
5.6.2.	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	67

5.6.3. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	71
BAB VI PENUTUP	74
6.1. Kesimpulan.....	74
6.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1. Tabel 5.1. Hasil Uji Validitas.....	53
Tabel 5.2. Hasil Uji Reabilitas	54
Tabel 5.3. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 5.4. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56
Tabel 5.5 Tanggapan Responden Tentang Perencanaan Anggaran	57
Tabel 5.6 Tanggapan Responden Tentang Kualitas Sumber Daya Manusia	58
Tabel 5.7 Tanggapan Responden Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.....	59
Tabel 5.8 Tanggapan Responden Tentang Kinerja Keuangan Daerah	60
Tabel 5.9 <i>Coefficients</i>	62
Tabel 5.10 Model <i>Summary</i>	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1. Kerangka Konseptual	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurunnya Kinerja Keuangan Daerah menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah Pusat. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat. Otonomi daerah mengamankan pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dan keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah pusat guna mengalokasikan sumber-sumber material yang substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda (Philip Mahwood dalam Ardinisari, 2019) . Sejalan dengan pendapat tersebut, Vincent Lemius dalam (Ardinisari, 2019) juga mengatakan bahwa otonomi daerah merupakan suatu kebebasan atau kewenangan dalam mengambil suatu keputusan politik maupun administratif sesuai dengan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penerapan Undang Undang No 35 Tahun 1999 tentang tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberi harapan agar pemerintah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antara pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta

peluang dan tantangan dalam persaingan global. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu mempercepat laju kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah (Rahardjo, 2011).

Lebih sederhana dikatakan oleh Oates dalam Rahardjo (2011) bahwa adanya desentralisasi memungkinkan penyesuaian pelayanan publik dengan permintaan lokal, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi, dan menciptakan persaingan antar jurisdiksi.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom tersebut, maka salah satu aspek yang harus diatur secara hati-hati oleh pemerintah daerah adalah masalah anggaran dan pengelolaannya. Secara umum anggaran dapat didefinisikan sebagai rencana terperinci dari pendapatan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya-sumber daya lainnya pada satu periode tertentu (Garrison, Noreen, dan Brewer. 2007). Sedangkan menurut Robert D Lee, et al. (1978) dalam (Garrison et al., 2007) bahwa laporan keuangan dapat menunjukkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang di dalamnya mencakup informasi tentang pemasukan, pengeluaran, aktivitas dan tujuan organisasi.

Sama halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga merupakan pelaksana pengelolaan anggaran yang dilaksanakan dalam periode satu tahun. Yani dalam (Ardinisari, 2019) menyatakan bahwa langkah awal dari pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam penganggaran juga memegang peranan penting sebagai *essential tools* untuk menjadikan perencanaan tersebut terlaksana. Oleh karena itu, antara perencanaan pembangunan dan penganggaran harus selaras sehingga perencanaan dapat

terlaksana secara optimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Permendagri No 70 Tahun 2019”) menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Setiap tahunnya pemerintah daerah membuat rencana keuangan tahunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rencana kerja anggaran dan rencana kerja SKPD akan disampaikan kepada DPRD sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) untuk disahkan menjadi APBD. Anggaran yang telah disahkan diharapkan dapat diserap oleh pemerintah daerah. Tingkat Kinerja Keuangan Daerah pemerintah pusat dan daerah sering menjadi topik utama yang dibahas baik oleh para pengamat ekonomi maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Kegagalan target Kinerja Keuangan Daerah memang berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur.

Rendahnya Kinerja Keuangan Daerah menimbulkan risiko ekonomi makro dan tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi. Sedangkan lambannya Kinerja Keuangan Daerah atau penumpukan di triwulan terakhir juga menimbulkan risiko Perencanaan anggaran keuangan negara, seperti memaksakan pelaksanaan kegiatan yang tidak perlu, lemahnya perencanaan kegiatan, dan menurunnya kualitas pelaksanaan kegiatan (BPKP, 2012 dalam Zarinah et al., 2016).

Kinerja Keuangan Daerah yang terlambat perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Arif (2014) menyatakan pemerintah daerah harus berperan lebih baik terhadap peningkatan daya serapan anggarannya dengan melakukan peningkatan kualitas perencanaan dan sumber daya manusia. Perencanaan anggaran yang buruk adalah hambatan yang signifikan, yang mencegah peningkatan penyerapan anggaran. Perencanaan merupakan faktor tunggal yang paling penting di tingkat pemerintah daerah, dan dapat memperparah semua kesulitan lainnya dalam Kinerja Keuangan Daerah (*Ministry of Finance, Planning and Economic Development of Uganda, 2011*).

Selain perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dalam hal ini pegawai negeri sipil sebagai aparat pengelolaan keuangan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran.. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rahardjo (2011) bahwa belum maksimalnya penyerapan penggunaan anggaran APBD oleh beberapa SKPD menunjukkan bahwa SKPD tersebut belum mampu memaksimalkan sumber daya manusianya.

Peranan sumber daya manusia dalam instansi pemerintah sangatlah penting karena penggerak utama seluruh kegiatan atau aktivitas organisasi dalam mencapai tujuannya baik untuk memperoleh keuntungan maupun untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi adalah manusia. Berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi organisasi dimulai dari usaha manusia itu sendiri dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi secara maksimal. Dengan kata lain kinerja organisasi sangat dipengaruhi dan bahkan

tergantung pada kualitas dan kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya

Salah satu faktor daya serap anggaran yang lambat di pengaruhi oleh tidak adanya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran. Menurut Halim (2012) dalam Maulana Yusuf (2016) penggunaan teknologi informasi adalah suatu keharusan yang akan semakin membantu tugas-tugas para pengelola keuangan daerah dalam menghasilkan formulir-formulir maupun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan SKPD secara akurat dan tepat waktu. Penggunaan teknologi informasi di dalam pengelolaan keuangan daerah telah diakomodir dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019 terkait penggunaan aplikasi komputer dalam mengelola keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan, sedangkan kualitas akan selalu terkait dengan pelaksanaan suatu program. Berdasarkan pra observasi masih terdapat beberapa pengelola keuangan daerah yang belum menguasai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang disebabkan oleh perubahan jenis aplikasi dari tahun ke tahun dimana satu aplikasi belum sepenuhnya dikuasai kemudian muncul aplikasi baru lagi sehingga masih ada pengelola keuangan daerah yang mengkombinasikan antar aplikasi dengan metode pelaporan keuangan yang masih manual.

Tanggung jawab untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan ada pada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penggunaan Sistem informasi pemerintahan daerah pada Kabupaten Buton Selatan sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi (information technology/IT)

maka diterapkanlah aplikasi dalam rangka percepatan pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah. SIPD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai salasatu alat bantu Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa masih belum optimalnya kualitas laporan keuangan, hal ini diindikasikan oleh belum optimalnya penerapan aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini akan menganalisis pengaruh Perencanaan, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut:

- 1) Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan?
- 2) Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan?
- 3) Apakah sistem informasi pemerintahan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan?

Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung pada Kabupaten Buton Selatan yang dapat uraian sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh perencanaan anggaran terhadap kinerja keuangan Kabupaten Buton Selatan
- 2) Untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan
- 3) Untuk menganalisis pengaruh sistem informasi pemerintahan daerah terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian terkait perencanaan keuangan, kualitas SDM, sistem informasi pemerintahan daerah.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk Kabupaten Buton Selatan dalam mengoptimalkan kinerja keuangan daerah.

Batasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah terbatas hanya mengamati pengaruh perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia serta penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah terhadap optimalisasi Kinerja Keuangan Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang aktivitas finansial pemerintah. Glen A. Welsch, et.al dalam Rahardjo (2011) menjelaskan bahwa keuangan publik merupakan suatu bentuk pernyataan dari sebuah rencana dan juga kebijaksanaan. Kebijaksanaan tersebut menyangkut manajemen yang digunakan dalam periode tertentu, yaitu petunjuk dalam periode tersebut. Sementara menurut Suparmoko dalam Supriati et al (2019) bahwa keuangan publik merupakan suatu ilmu tentang pengaruh-pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara (publik) terhadap perekonomian, terutama pengaruh terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, distribusi pendapatan yang lebih merata, peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja. Dengan demikian, Otto Eckstein dalam Rahardjo (2011) menulis bahwa keuangan publik merupakan studi tentang dampak anggaran terhadap ekonomi, terutama pengaruhnya terhadap pencapaian objek ekonomi utama seperti pertumbuhan, stabilitas, keadilan dan efisiensi. Pada dasarnya, keuangan publik menjelaskan belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah bertujuan agar pengelolaan keuangan rakyat oleh pemerintah dilakukan dengan transparan baik dari proses

penyusunan hingga pertanggungjawabannya sehingga akan tercipta Perencanaan anggaran didalam pengelolaannya(Karsana dan Suaryana, 2017).

Implikasi keuangan publik terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton Selatan sebagai suatu lembaga pemerintahan akan senantiasa berupaya menjalankan pemerintahan dengan pengembangan teknik-teknik ekonomi demi mengoptimalkan pendapatan dan merealisasikan alokasi belanja secara cepat dan merata guna menjaga stabilitas ekonomi secara khusus dan menjamin ketersediaan pelayanan dasar terhadap masyarakat

Dalam penelitian Karsana dan Suaryana (2017), pertanggungjawaban pemerintah atas segala kegiatan yang dilakukan disajikan dalam Laporan Keuangan yang terdiri dari 7 jenis laporan yaitu

- 1) Laporan Realisasi Anggaran,
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
- 3) Neraca,
- 4) Laporan Operasional,
- 5) Laporan Arus Kas,
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2016:121) Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi tujuan yaitu :

- 1) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
- 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan

4) Memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Sino et al., (2013) menguraikan hasil analisis keuangan daerah digunakan sebagai tolak ukur dalam :

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otda.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Perencanaan Anggaran.

Perencanaan Anggaran Secara umum perencanaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan telah lalu. Perencanaan (*planning*) merupakan proses yang diawali dengan penetapan tujuan organisasi berupa penentuan strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh serta perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan tersebut (Robbins dan Coulter, 2002 dalam Zarinah et al., 2016). Perencanaan dapat dilihat dalam tiga kategori, yaitu:

1) Kategori Proses

Perencanaan merupakan suatu proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cara atau strategi dalam pencapaian tujuan tersebut.

2) Kategori Fungsi Manajemen.

Perencanaan berfungsi pada kondisi dimana pimpinan menggunakan pengaruh atau wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan serta kegiatan organisasi.

3) Kategori Pengambilan Keputusan.

Perencanaan adalah pengambilan keputusan jangka panjang atau yang akan datang mengenai hal yang akan dilakukan, cara pelaksanaan, dan waktu serta pelaku hal tersebut. Dalam perencanaan, keputusan yang diambil belum tentu sesuai dengan tujuan sebelumnya sehingga implementasi perencanaan tersebut akan dibuktikan pada masa yang akan datang. Pokok dari perencanaan adalah salah satu langkah antisipasi atas kejadian di masa depan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Perencanaan anggaran adalah salah satu bagian dari perencanaan organisasi, baik untuk organisasi publik maupun organisasi privat.

Menurut Conyers dan Hills dalam Susan (2019) perencanaan diartikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Merujuk pada definisi tersebut, terdapat empat indikator perencanaan anggaran menurut Conyers dan Hills dalam Susan (2019), yaitu :

- 1) Merencanakan berarti menentukan pilihan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa tahap perencanaan adalah proses pemilihan berbagai sumber daya yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan.
- 2) Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Pada tahap perencanaan dilaksanakan suatu proses alokasi besarnya sumber daya-sumber daya yang digunakan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu pilihan berarti menentukan prioritas pembangunan daerah, baik fokus (sektoral) maupun lokusnya (wilayah). Lokus memperlihatkan wilayah (kabupaten/kota/kecamatan/kawasan) yang ingin dikerjakan, sedangkan fokus memperhatikan sektor yang menjadi prioritas.
- 3) Perencanaan adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan ini tercermin dari target atau ukuran kinerja yang ingin dicapai.
- 4) Perencanaan untuk masa depan. Diartikan bahwa perencanaan merupakan tahap yang diperlukan dalam menentukan masa depan.

Berbicara tentang perencanaan dan penganggaran anggaran pemerintah, sejak tahun 1990 proses tersebut sudah berubah secara substansial, aspek perubahan dan tuntutan yang mendasar terletak pada pertanggungjawaban dari kinerja pemerintah dan ketersediaan dari teknologi informasi (Kasmir, 2016). Di Indonesia, tuntutan perubahan tersebut mulai terasa sejak tahun 1998, dikarenakan adanya tuntutan reformasi yang menuntut untuk diwujudkannya sistem tata kelola pemerintah yang baik. Sehingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menekankan pengintegrasian sistem pertanggungjawaban kinerja kedalam sistem penganggaran. Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tersebut memaparkan bahwa rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja (kinerja) yang akan dicapai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBD/APBN dalam undang-undang tersebut meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem Perencanaan anggaran kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Proses perencanaan dan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD merupakan tahapan awal dalam perumusan APBD. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Pusat. RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Setelah RKPD ditetapkan, Pemerintah daerah perlu menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
Kebijakan Umum APBD (KUA)
3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan PPAS tersebut disusun dengan tahapan; menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Selanjutnya menyusun RKA-SKPD yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana

pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dijabarkan sampai 30 dengan penjabaran objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

5. Penyiapan Raperda APBD. Selanjutnya, berdasarkan pada RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.
6. Penetapan APBD Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tersebut dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Konsep APBD

Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan lain yang

mencakup jangka waktu satu tahun (Mulyadi, 1993) dalam (Puspaningsih, 2002). Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Sedangkan Anggaran menurut Supriyono (1999) dalam (Puspaningsih, 2002) merupakan suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu umumnya satu tahun.

Seluruh komponen organisasi mulai dari *top management* hingga para staf memegang peranan penting mulai dari proses perencanaan, penerapan, hingga evaluasi anggaran. Terdapat beberapa fungsi yang mengaitkan anggaran dengan manajer (pemimpin) dan para staf yang terkait di dalamnya. Fungsi-fungsi tersebut antara lain adalah (Mardiasmo, 2002) :

1. Anggaran sebagai alat perencanaan

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui perencanaan, seorang manajer atau pimpinan mengidentifikasi hasil kerja yang diinginkan dan mengidentifikasi tindakan untuk mencapainya. Dalam kaitannya dengan fungsi perencanaan, anggaran merupakan tujuan/target yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode tertentu. Dalam rangka pencapaian rencana jangka pendek (sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang), maka manajemen perlu menyusun anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan (Puspaningsih, 2002)

2. Anggaran sebagai alat pengendalian.

Anggaran sebagai instrument pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Proses pengendalian dapat diidentifikasi menjadi 3 tipe yakni: *preliminary control*, *concurrent control*, dan *feedback control* (Welsch dalam Puspaningsih, 2002). Dalam kaitannya dengan anggaran, anggaran dapat dijadikan alat pengendalian kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan. Pada tahap *preliminary control* anggaran dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan sumber daya dan orang-orang yang dilibatkan agar siap untuk memulai kegiatan.

Pada tahap *concurrent control* pengendalian dilakukan dengan cara observasi terhadap orang-orang yang terkait dan laporan untuk menjamin bahwa sasaran sudah tepat dan kebijakan serta prosedur telah dilaksanakan dengan baik selama kegiatan berlangsung. Dalam kaitannya dengan anggaran, pada tahap ini dibandingkan antara realisasi dengan anggarannya. Juga disiapkan laporan tentang realisasi, anggaran dan selisih anggaran. Dari selisih yang ada kemudian dicari penyebab terjadinya selisih tersebut. Berikutnya dikembangkan beberapa alternatif tindakan koreksinya serta dipilih alternative yang terbaik. Selanjutnya hasil dari tahap ini digunakan pada tahap *feedback control* untuk menyusun pengendalian kegiatan yang akan datang (Puspaningsih, 2002).

3. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi.

Setiap unit kerja pemerintahan terkait dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu,

anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

4. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja.

Dalam hal ini, kinerja *budget holder* akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja (Mardiasmo, 2002).

5. Anggaran sebagai Alat Motivasi.

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai (Mardiasmo, 2002).

Agar dapat memenuhi fungsi-fungsi tersebut, seluruh pemimpin dan para stafnya terutama yang terkait dalam penyusunan anggaran harus memiliki kualifikasi yang memadai dan memiliki pengetahuan, keterampilan serta pola pikir yang mendukung penerapan anggaran yang sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan penyusunan anggaran adalah untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait

sehingga anggaran dimengerti, didukung dan dilaksanakan. Salah satu langkahnya adalah negosiasi pihak-pihak yang terkait mengenai angka anggaran.

Tahap implementasi atau penerapan merupakan tahap dalam penganggaran setelah diselesaikannya tahap penetapan sasaran atau perencanaan. Setelah sasaran ditetapkan dan manajer yang harus bertanggungjawab atas pencapaian sasaran tersebut sudah ditunjuk, manajer tersebut diberi alokasi sumber daya. Selanjutnya, bidang-bidang atau unit-unit yang terkait dengan anggaran menyusun anggaran secara komprehensif untuk disahkan oleh pimpinan institusi. Anggaran untuk selanjutnya diimplementasikan dan berfungsi sebagai *blueprint* berbagai tindakan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Dalam tahap implementasi ini, manajer bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan anggaran yang telah disahkan tersebut kepada manajer tingkat menengah dan bawah. Hal ini dimaksudkan agar manajer menengah dan bawah tahu dan bersedia dengan penuh kesadaran untuk mencapai standar yang sudah ditetapkan dalam anggaran. Dalam tahap implementasi ini, juga diperlukan kerjasama dan koordinasi agar anggaran dapat diimplementasikan dengan baik (Puspaningsih, 2002)

Proses Penyusunan APBD

Indikasi keberhasilan Otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), kehidupan serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah. Keadaan tersebut dapat

tercapai, salah satunya apabila manajemen keuangan (anggaran) dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan Otonomi daerah secara tidak langsung akan memaksa daerah untuk melakukan perubahan-perubahan, baik perubahan struktur maupun perubahan proses birokrasi dan kultur birokrasi. Perubahan kultur meliputi pembaharuan yang sifatnya kelembagaan (*Institutional reform*) yaitu perubahan struktur birokrasi Pemerintah Daerah yang lebih ramping akan tetapi kaya fungsi (*form follow functions*). Perubahan proses meliputi perubahan yang menyentuh keseluruhan aspek dalam siklus pengendalian manajemen di Pemerintah Daerah, yaitu perumusan strategis, perencanaan strategik, penganggaran, pelaporan kinerja, penilaian kinerja, dan mekanisme reward and punishment sistem. Perubahan kultur birokrasi terkait dengan perubahan budaya kerja dan perilaku pegawai yang mengarah pada tercapainya profesionalisme birokrasi. (Arif, 2014)

Usaha penyempurnaannya melakukan konsepsi anggaran yang berorientasi pada program yang dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Berorientasi pada program berarti bahwa penggunaan sejumlah dana tertentu telah mempunyai maksud dan tujuan yang diperlukan disusun dalam suatu anggaran yang ditentukan besar kecilnya target yang hendak dicapai oleh suatu program yang menjadi pusat perhatian ialah kegunaan mengukur efisiensi terhadap kegiatan dan penilaian terhadap hasil akhir.

Seluruh jumlah dana-dana yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari suatu unit performance tertentu, pada hakekatnya meliputi

biaya-biaya yang dapat pula diklasifikasikan dalam bentuk objek pembelanjaan. Dengan perkataan lain jumlah biaya kegiatan sama dengan jumlah kinerja menurut objek pembelanjannya. Dengan memperhatikan proses penyusunan anggaran dalam performance budgeting sistem ini, maka anggaran yang dihasilkan jelas merupakan suatu program kerja. Konsekuensinya adalah menuntut kepada para penyusun dan pelaksana anggaran untuk selalu berorientasi kepada program. Selain itu dapat pula dilakukan penilaian sampai sejauhmana pengelolaan input itu akan menggunakan biaya secara berdayaguna dan berhasilguna karena telah jelas hasil akhirnya (*end product*).

Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan, anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam era otonomi Daerah disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau output anggaran.

Perubahan dalam perumusan strategi dan perencanaan strategik sudah mulai dilakukan misalnya dengan dibuatnya Propenas, Renstra dan Repeta baru yang lebih lanjut dijabarkan oleh daerah dalam bentuk Propeda, Renstrada, dan Repetada. Perubahan sistem penganggaran juga mulai dilakukan, dengan digunakannya anggaran kinerja (*performance budget*) yang menggunakan struktur baru yang berbeda dengan struktur APBD periode sebelumnya. Selain itu sudah pula mulai menggunakan Standar Analisa Belanja (SAB) sebagai alat untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas anggaran, oleh karena itu, tahap

penganggaran ini sangat penting karena anggaran yang tidak mengakomodasikan Repetada, Renstrada dan Repetada akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. APBD sekurang- kurangnya mencakup 3 (tiga) aspek yaitu aspek perencanaan, aspek pengendalian dan Perencanaan anggaran publik.(Arif, 2014)

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja, yaitu kinerja anggaran (*anggaran policy*) dan anggaran kinerja (*performance budget*). Kinerja anggaran adalah alat atau instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja Kepala Daerah. Alat tersebut berupa strategi makro dan Policy yang tertuang dalam Propeda dan Renstrada, arah dan kebijakan umum APBD, serta strategi dan prioritas APBD. Anggaran keuangan adalah alat atau instrumen yang dipakai oleh Kepala Daerah untuk mengevaluasi unit-unit kerja yang ada di bawah kendali Kepala Daerah selaku kepala eksekutif.

APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atas hasil yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan APBD.

Anggaran kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan biaya atau input yang ditetapkan. Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikembangkan Standar Analisa Belanja, tolok ukur kinerja, dan standar biaya.

Standar Analisa Belanja (SAB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. SAB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. SAB digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program anggaran atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran. Penilaian terhadap usulan anggaran belanja dikaitkan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai melalui program atau kegiatan.(Arif, 2014)

SAB pada dasarnya merupakan standar belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan pada tingkat pencapaian (target kerja) yang diinginkan. SAB dihitung oleh masing-masing SKPD berdasarkan proyeksi jumlah anggaran belanja setiap program dan atau kegiatan. Usulan anggaran belanja yang tidak sesuai dengan SAB akan ditolak atau direvisi sesuai standar yang ditetapkan. Rancangan APBD disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap anggaran belanja yang diusulkan SKPD.

Penerapan SAB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain (1) mendorong setiap unit kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan program dan atau kegiatannya, (2) menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja, (3) mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi.

Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan mendukung kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan oleh Daerah dan sekaligus merupakan Perencanaan anggaran daerah. Penetapan Standar Pelayanan untuk Daerah Kabupaten mengacu pada indikator- indikator pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan berpedoman pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh Bupati.

Tingkat pelayanan yang diinginkan pada dasarnya merupakan indikator kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya. Selanjutnya untuk penilaian kinerja dapat digunakan ukuran penilaian didasarkan pada indikator sebagai berikut:

1. Masukan (*input*), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau berdasarkan sumber-sumber: dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan.
2. Keluaran (*output*) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.

3. Hasil (*outcome*) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Manfaat (*benefit*) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dari hasil.
5. Dampak (*impact*) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampak terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Esensi utama anggaran ini adalah memasukan elemen indikator kinerja dalam proses penyusunan APBD di daerah. Maka seluruh program/ kegiatan yang didanai APBD mesti memiliki tujuan/sasaran yang terukur mulai dari input, output, keuntungan, dampak dan manfaatnya.

2.1.5. Implementasi APBD

Perkembangan reformasi sektor publik yang begitu dinamis saat ini tidak dapat dilepaskan dari tuntutan masyarakat yang melihat secara kritis buruknya kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Perubahan berbagai aspek yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik (asmadewa, 2006)

Agenda-agenda reformasi terhadap tuntutan perubahan organisasional kemudian menciptakan sejumlah prinsip atau doktrin tata kelola pemerintahan seperti terangkum dalam konsep *new public management* (Hood, 1991) dalam (asmadewa, 2006) atau prinsip *reinventing government*. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah ditunjang oleh kualitas pengelolaan kas

pemerintah, salah satunya dengan proses perencanaan kas secara nasional yaitu focus mendorong proporsionalitas proses pelaksanaan anggaran dengan rencana penarikan dana bagi setiap satker (Agus Suprijanto, 2011 dalam (Rahmawati, 2019))

Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Pemerintah sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah tentang APBD selanjutnya menerbitkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Selatan digunakan untuk kegiatan pemerintahan adalah anggaran rutin untuk kegiatan operasional dan berisikan program untuk mendukung kegiatan administrasi perkantoran. Kegiatan yang bersifat teknis yang melibatkan seluruh SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Perencanaan penganggaran melibatkan seluruh SKPD, mulai dari penentuan program dan kegiatan, klasifikasi belanja, indicator kinerja dan target kinerja. Dokumen anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang ujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari satuan kegiatan yang dianggarkan.

Menurut pengamatan lapangan, pelaksanaan anggaran pada Pemerintah

Kabupaten Buton Selatan dirasakan masih belum optimal. Adanya Kinerja Keuangan Daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterlambatan pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi pembengkakan Kinerja Keuangan Daerah pada akhir tahun. Kondisi ini menarik bagi peneliti untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, sudahkah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan mencapai sasaran yang efektif, bermanfaat untuk kepentingan publik serta bisa dipertanggungjawabkan.

Tahap pelaksanaan anggaran merupakan kewenangan bupati selaku kepala pemerintah daerah untuk melaksanakan seluruh kebijakan yang telah tertuang dalam undang-undang tersebut. Pada awal tahun anggaran, langkah pertama yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan anggaran meliputi penetapan pejabat pengelola anggaran serta penerbitan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dasar hukum pelaksanaan anggaran bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pada saat anggaran direalisasikan ke dalam satker per departemen atau instansi ternyata apa yang direncanakan dengan apa yang menjadi realitas keseharian sering kali tidak sesuai dengan target. Dengan demikian daya serap anggaran bisa dikatakan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Sehingga daya serap anggaran lebih rendah dari apa yang telah direalisasikan sesuai dengan satuan kegiatan masing-masing per departemen atau instansi. (Simanjuntak, 2005)

Menurut Simanjuntak, rendahnya daya serap anggaran dikarenakan beberapa faktor. Namun yang paling utama dan mendasar adalah faktor internal. Mengapa demikian? Karena, kinerja organisasi yang tidak profesional dalam

mengelola anggaran yang sudah direalisasikan dapat menjadi kendala utama. Seperti lambatnya aparat birokrasi merevisi anggaran, tidak akurasi revisi anggaran dengan perencanaan sehingga terpaksa dilakukan beberapa kali revisi, pengalokasian dana pada berbagai sektor yang menjadi prioritas, serta terjadinya perubahan prioritas program dan kegiatan, dan lainnya. Sedangkan faktor eksternal adalah hubungan pemerintah pusat dan daerah, anggaran yang ditunda realisasikan dikarenakan instabilitas kondisi ekonomi dunia yang berimplikasi pada kondisi keuangan nasional, dan lainnya. (Simanjuntak, 2005)

2.1.6 Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (*human resources*) adalah *the people who are ready, willing and able to contribute to organizational goals* (Werther dan Davis, 1996 dalam (Ardinisari, 2019). Nogi (dalam Ardinisari, 2019) berpendapat bahwa kualitas SDM adalah unsur yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan organisasi terhadap kebutuhan publik. Oleh karena itu, terdapat dua elemen mendasar yang berkaitan dengan pengembangan SDM yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki karyawan/pekerja. Sedangkan Notoadmodjo dalam de Jesus (2006) menyatakan bahwa kualitas SDM menyangkut dua aspek, yaitu aspek kualitas fisik dan aspek kualitas nonfisik, yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-keterampilan lain.

Sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi adalah SDM yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif-

generatif inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti *intelligence*, *creativity*, dan *imagination*; tidak lagi semata-mata menggunakan energy kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya.(Silalahi & Mifka, 2015)

Dalam mengelola sumber daya manusia, diperlukan sistem pengendalian manajemen agar tujuan organisasi tercapai. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian organisasi dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi atau melalui sistem pengendalian dan manajemen informasi yang dirancang secara formal. Dalam suatu organisasi setiap orang memiliki tujuan personal (*individual goal*). Untuk menyikapi hal tersebut perlu adanya suatu jembatan yang mampu mengantarkan organisasi mencapai tujuannya, yaitu tercapainya keselarasan antara *individual goal* dengan *organization goal*. Dalam hal ini, sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan adanya *goal congruence*, yaitu keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan personal (Mardiasmo, 2002)

Selanjutnya, agar proses perubahan pendekatan penganggaran tersebut dapat mencapai tujuannya dengan sukses, setiap organisasi juga harus memperhatikan kultur organisasi. Kultur organisasi terkait dengan lingkungan kerja dan kesediaan anggota untuk melakukan perubahan. Perencanaan strategik harus didukung dengan budaya organisasi yang kuat. Perencanaan strategik harus diikuti dengan perubahan perilaku dan sikap anggota organisasi

untuk melaksanakan program-program secara efektif dan efisien. Program-program yang sudah dirancang secara baik dapat gagal bila personel di lapangan bertindak tidak sesuai dengan arah dan strategi (Mardiasmo, 2002)

Kunci menuju keunggulan kompetitif suatu organisasi, pada dasarnya bersandar pada penggunaan optimal sumber daya manusianya dan pemeliharaan kerjasama antara pengguna jasa dan orang yang diperkerjakan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan organisasi (Singh,1997) dalam (Hutapea & Nurianna Thoha, 2008). Tidak mudah menjadikan Sumber daya manusia sebagai sumber keunggulan kompetitif organisasi karena hal itu berkaitan dengan bukan saja faktor kemampuan dan keahlian melainkan berkaitan pula dengan faktor-faktor personal lainnya seperti, nilai yang dianut, persepsi, sikap, personality, dan kemauan individu untuk maju. Sumber daya manusia dikatakan memiliki keunggulan kompetitif jika memiliki kemampuan dan keahlian yang khas dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan *organizational personality* di mana mereka bekerja (Alwi, 2001).

Goal setting theory menyatakan bahwa individu berkomitmen terhadap sasaran, artinya bertekad untuk tidak menurunkan/meninggalkan sasaran atau menghasilkan tingkat kerja yang lebih tinggi. Hal tersebut juga dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan daerah (Putri, 2010).

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran karena Sumber daya manusia selalu terkait mulai dari penetapan sasaran hingga evaluasi. Sumber daya manusia memiliki fungsi penting dalam penentuan indikator kinerja yang merupakan bagian dari penetapan sasaran anggaran dimana mekanismenya memerlukan hal-hal berikut seperti diungkapkan oleh (Alwi, 2001):

1. Sistem perencanaan dan pengendalian.

Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggungjawab.

2. Spesifikasi teknis dan standardisasi.

Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian.

3. Kompetensi teknis dan profesionalisme.

Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standardisasi yang telah ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan professional dalam bekerja.

4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar.

Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya *value for money*. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (alat pembinaan).

5. Mekanisme Sumber Daya Manusia.

Pemerintah dalam hal ini pemimpin perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi

Kualitas Sumber daya manusia untuk ikut serta dalam pencapaian tujuan organisasi ditentukan oleh faktor pendidikan dan pengalaman kerja. Pendidikan merupakan proses pengembangan pemahaman mengenai pengetahuan, yang meliputi, juga pengembangan kemampuan mental mengenai pemecahan masalah. Perilaku di dalam pengambilan keputusan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap tujuan perusahaan, karena pendidikan juga memberikan arah mengenai sikap atau perilaku seseorang di dalam perusahaan. Sedangkan pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil dia melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Puspaningsih, 2002).

Salah satu manfaat utama penggunaan kompetensi dalam organisasi adalah menggerakkan Sumber daya manusia ke arah target yang ingin dicapai organisasi. Di samping itu, kompetensi akan mendorong karyawan untuk mendapatkan dan menerapkan *skill* dan *knowledge* sesuai kebutuhan pekerjaan, karena hal ini merupakan instrument bagi pencapaian targetnya. Untuk itu sistem pengembangan Sumber daya manusia di organisasi haruslah berdasarkan kompetensi. Sistemnya harus terintegrasi mulai dari rekrutmen, penempatan orang, *performance appraisal*, sistem kompensasi dan pengembangan karir.

Adapun Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia menurut (Hutapea & Nurianna Thoha, 2008) yaitu :

1. Memahami bidangnya masing-masing

2. Pengetahuan
3. Kemampuan
4. Semangat kerja
5. Kemampuan perencanaan/pengorganisasian.

2.1.7 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Pemerintah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan pengelolaan pemerintahan daerah dan informasi pemerintahan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah. Sistem tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Atas dasar tersebut pemerintah daerah mengembangkan sebuah sistem informasi keuangan yang memiliki kekuatan fitur bukan hanya dari sisi kelengkapan fungsionalitasnya saja, namun juga memiliki kekuatan dalam proses integrasi dengan sistem-sistem lainnya yang terkait. Aplikasi SIPD merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD. Adapun fungsi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penyatuan referensi nasional
- b. Proses perencanaan dan keuangan daerah lebih mudah dilakukan secara sistem elektronik
- c. Evaluasi perencanaan keuangan, kinerja dan produk hukum dilakukan melalui sistem elektronik
- d. Data base pembangunan dan keuangan nasional dan daerah
- e. Analisa data daerah secara nasional dapat dilakukan lebih mudah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah.

Aplikasi SIPD diolah oleh Direktorat Bina Keuangan Daerah Lementierian Dalam Negeri. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pemerintahan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auiditabel

Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dikategorikan sebagai sistem informasi, karena SIPD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkaitlainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Yani,2009).

Hal ini mengindikasikan suatu kemajuan akan kinerja instansi di pemerintah daerah karena menunjukkan bahwa dalam penyajian Laporan Keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Perundang- undangan yang berlaku serta disajikan secara andal dan tepat waktu.

Menurut Maulana Yusuf (2016) penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dapat diukur menggunakan indikator berikut:

1. Keamanan data
2. Kecepatan dan ketepatan waktu
3. Ketelitian
4. Variasi laporan atau output dan
5. Relevansi sistem.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

- 1) **Siregar (2019)** menemukan bahwa kualitas SDM mempengaruhi kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- 2) **Zarinah et al. (2016)** dalam penelitiannya menemukan bahwa rendahnya Kinerja Keuangan Daerah menimbulkan risiko ekonomi makro dan tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi. Sedangkan lambannya Kinerja Keuangan Daerah atau penumpukan di triwulan terakhir juga menimbulkan risiko Perencanaan anggaran keuangan negara, seperti memaksakan pelaksanaan kegiatan yang tidak perlu, lemahnya perencanaan kegiatan, dan menurunnya kualitas kinerja keuangan daerah.
- 3) **Dyastiarini (2015)** dalam penelitiannya menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh antara implementasi SIPD dan non-SIPD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 4) **Maulana Yusuf (2016)** dalam penelitiannya mengemukakan bahwa penggunaan teknologi informasi adalah suatu keharusan yang akan semakin membantu tugas-tugas para pengelola keuangan daerah dalam menghasilkan formulir-formulir maupun laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan SKPD secara akurat dan tepat waktu.
- 5) **Susan (2019)** perencanaan dapat dijadikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.
- 6) **Arif (2014)** menemukan bahwa upaya penyempurnaannya melakukan konsepsi anggaran yang berorientasi pada program yang dapat dilihat

pada kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Berorientasi pada program berarti bahwa penggunaan sejumlah dana tertentu telah mempunyai maksud dan tujuan yang diperlukan disusun dalam suatu anggaran yang ditentukan besar kecilnya target yang hendak dicapai oleh suatu program yang menjadi pusat perhatian ialah kegunaan.

- 7) **Rahmawati (2019)** menemukan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah ditunjang oleh kualitas pengelolaan kas pemerintah, salah satunya dengan proses perencanaan kas secara nasional yaitu focus mendorong proporsionalitas proses pelaksanaan anggaran dengan rencana penarikan dana bagi setiap satker.
- 8) **Putri (2010)**. Goal setting theory menyatakan bahwa individu berkomitmen terhadap sasaran, artinya bertekad untuk tidak menurunkan/meninggalkan sasaran atau menghasilkan tingkat kerja yang lebih tinggi. Hal tersebut juga dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan daerah.
- 9) **Purnamasari (2019)** Semakin tinggi komitmen dan semakin baik disiplin kerja yang dimiliki oleh pegawai, maka akan berdampak terhadap peningkatan kinerja yang artinya kinerja pun akan semakin baik. Sistem Informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pengelola keuangan pada SKPD di Kota Makassar. Ini juga mengindikasikan bahwa semakin baik sistem informasi akuntansi maka akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja.
- 10) **Sumaryati et al., (2020)**. The results of hypothesis testing indicate that HR competency has an effect on the quality of FS; however, the application of AIS and internal control system has no effect on the quality of FS. The implication of this research underlines the importance of HR competency to improve the quality of local government FS.